

## MODEL PERENCANAAN PROGRAM AKSI DESA MANDIRI PANGANDI DESA KEBON GUNUNG, PURWOREJO

Oleh:

Febtory Setyo Harsanti<sup>1)</sup>, Eko Murdiyanto<sup>2)</sup> dan Nanik Dara Senjawati<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo. <sup>2)</sup> Prodi  
Magister Agribisnis, Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta

### ABSTRACT

*FEBTORY SETYO HARSANTI, Planning Model of Food Self-sufficient Village Action Program in Kebon Gunung Village, Purworejo. Under the guidance of EKO MURDIYANTO and NANIK DARA SENJAWATI. Food Self-sufficient Village Program is an action program to reduce food insecurity and nutrition through the utilization of resources, institutions and local rural wisdom. This research was conducted because of the difference of success among the beneficiary villages, despite having the same top down program. The objectives of this study are 1) To examine the causes of unsuccessful for Food Self-sufficient Village Action Program in Kebon Gunung Village; 2) Formulate the appropriate program planning approach for the people of Kebon Gunung Village. This research method is qualitative with supported quantitative data. Determining the location and selection of respondents using purposive method. Analysis method using Miles and Huberman model through three stages, namely 1) Reduction of data; 2) Presentation of data; 3) Verify. The results of the research indicate that 1) Food Self-sufficient Village Action Program has not been successful due to a) Limited budget, so that the organizers can not carry out continuous assistance and have never conducted training for beneficiaries; b) There is no coordination between the facilitator with village apparatus in determining Poor Households, so that the beneficiaries are selected not based on criteria but directly elected by the Village Head; c) The facilitator lacks the socialization of the Village Food Team task, so it has not worked and there is no village food barn yet; d) The facilitator has not provided any socialization regarding the establishment of the Village Finance Institution, so it has not been established; e) The facilitator has not been actively engaged in integration with the relevant agencies (stakeholders); f) Beneficiaries participate less, so there has not been productive efforts. 2) Approach Planning of the right program is top down with the assistance because the people of Kebon Gunung Village (beneficiaries) is a transitional society.*

*Keywords: Planning Model, Food Self-sufficient Village Action Program* **Keywords: Planning Model, Food Self-sufficient Village Action Program**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata untuk mencapai kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan.

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumber daya lokal, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga, yang akhirnya berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di perdesaan, sejalan dengan salah satu tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs), yaitu untuk mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan di dunia sampai setengahnya di tahun 2015.

kemudian dilanjut dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*), yang diberlakukan pada bulan Oktober 2015 – tahun 2030, dimana memiliki 17 tujuan dan 169 target. Tujuan pertama adalah mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun. Tujuan kedua adalah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yang berkelanjutan.

Kegiatan Demapan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Kegiatan Demapan ini merupakan kegiatan lintas sektor yang dalam pelaksanaannya memerlukan keterlibatan dan sinergitas antar instansi dan *stakeholder* terkait. Demapan ini merupakan wujud integrasi pengembangan program pembangunan dari pusat, provinsi, dan kabupaten di pedesaan.

Kegiatan Desa Mandiri Pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA (*Food Insecurity Atlas*) 2005/FSVA (*Food Security and Vulnerability Atlas*) 2009 dan Desa rawan pangan, dengan jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30 % dari jumlah KK (Kepala Keluarga) berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Selama ini pelaksanaan Program Aksi Desa Mandiri Pangan bersifat *top down* (dari atas), yang mana Pemerintah Pusat sebagai pencetus gagasan, dengan asumsi mereka tahu yang baik bagi masyarakatnya, tanpa harus mendengarkan atau mengakomodasi aspirasi masyarakat (bawah). Dalam hal ini, masyarakat dilibatkan atau dimobilisasi dengan memberikan insentif dan atau menumbuhkan rasa takut (Mardikanto, 2013).

Pada tahun 2014, Kabupaten Purworejo memperoleh Program Demapan untuk Desa Kebon Gunung dan Desa Loano, Kecamatan Loano. Kedua desa tersebut dipilih karena berdasarkan pemetaan daerah rawan pangan FIA tahun 2013, Desa Kebon Gunung dan Desa Loano masuk dalam peta warna merah. Kegiatan yang dilakukan berupa

pembesaran ternak kambing jawa randu. Pada awal kegiatan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan kambing dengan jumlah 30 ekor betina dan tiga ekor jantan kepada masing-masing Kelompok Afinitas (KA). Bantuan yang diberikan ini berupa kambing karena sudah ditetapkan oleh BKP Provinsi Jawa Tengah. Sebelum memperoleh bantuan, masyarakat di Desa Kebon Gunung sudah banyak yang memelihara kambing, terutama kambing jawa randu dan wilayahnya sangat berpotensi untuk memelihara kambing, apalagi didukung adanya ketersediaan rumput dan hijauan sebagai pakan utama ternak kambing.

Sedangkan Program Aksi Demapan yang diberikan kepada Desa Kebon Gunung Kecamatan Loano, meskipun sama-sama bersifat *top down*, yaitu program berasal dari pemerintah, namun kegiatan-kegiatan dalam program ini belum diikuti sepenuhnya oleh masyarakat yang ditunjuk, yang dibuktikan dengan belum adanya keaktifan dari kelompok afinitas, anggota kelompok masih ada yang melanggar ketentuan dan kesepakatan kelompok afinitas, belum berjalannya Tim Pangan Desa (TPD) maupun Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan juga perguliran kambing belum berjalan lancar. Berdasarkan permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa Program Aksi Demapan di Desa Kebon Gunung belumlah berhasil, meskipun saat ini sudah berjalan pada tahun keempat (2017), yang mana masuk dalam tahap kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menjawab permasalahan tersebut.

## 2. Identifikasi Masalah

Latar belakang pada uraian sebelumnya menyebutkan adanya perbedaan keberhasilan diantara beberapa lokasi penerima Program Demapan, meskipun memiliki kesamaan program yang bersifat *top down*. Untuk itu, dapat diambil rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Mengapa Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo belum berhasil?
2. Bagaimanakah Pendekatan Perencanaan Program yang tepat untuk masyarakat Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo?

## 3. Tujuan

1. Mengkaji penyebab belum berhasilnya Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.
2. Merumuskan pendekatan perencanaan program yang tepat untuk masyarakat Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo.

## B. LANDASAN TEORI

### 1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*) sebagai suatu konsep perubahan sosial harus diakui untuk selalu mengacu atau berpijak pada paradigma pembangunan berbasis masyarakat yang disampaikan oleh Korten (1985) dalam Mardikanto (2013), memiliki dua aspek utama, yaitu Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebiato (2017), Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional.

### 2. Pendekatan Perencanaan Program

Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaikbaiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

### 3. Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Program Aksi Desa Mandiri Pangan pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat yang menekankan penerapan pelaksanaan penguatan kelembagaan pembangunan masyarakat dan aparat di tingkat lokal berdasar prinsip pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan. Kegiatan Program Aksi Desa Mandiri Pangan mengutamakan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola masyarakat secara langsung dalam wadah kelembagaan-kelembagaan lokal yang dikoordinasikan oleh lembaga lokal baik desa, kecamatan dan tingkat di atasnya (Syamsiar, 2010).

### 4. Karakteristik Penerima Manfaat

Menurut Mardikanto (2017), ada beberapa karakteristik penerima manfaat yang perlu dicermati adalah Karakteristik pribadi, yang mencakup jenis kelamin, umur, suku/etnis,

agama, dan lain-lain. Status sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan keterlibatannya dalam kelompok/organisasi masyarakat. Perilaku keinovatifan sebagaimana yang dikelompokkan oleh Rogers (1971) yang terdiri dari perintis (*inovator*), pelopor (*early adopter*), penganut dini (*early majority*), penganut lambat (*late majority*) dan kelompok yang tidak bersedia berubah (*laggards*). Dan moral ekonomi masyarakat, yang dibedakan dalam *moral subsistensi* dan *moral rasionalitas*.

### C. METODE PENELITIAN

Metode lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu cara pengambilan daerah penelitian dengan mempertimbangkan alasan yang diketahui dari daerah penelitian tersebut (Sugiyono, 2010). Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan didukung data kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menjadi anggota Kelompok Afinitas, yaitu kelompok yang melaksanakan Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung. Sampel dipilih berdasarkan *purposeful sampling*, yaitu peneliti secara sengaja memilih individu dan tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan konsep dan tujuannya, meskipun saat ini sudah pada tahap kemandirian. Kondisi ini mengakibatkan ada program yang tidak sesuai dengan karakter penerima manfaat. Seharusnya di awal, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Purworejo memberikan panduan mengenai *assesment* atau kriteria RTM yang akan dijadikan penerima manfaat.

Selain itu juga seharusnya sebelum program dilaksanakan, terlebih dahulu mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menggali potensi SDA maupun SDM yang ada di Desa Kebon Gunung. Kenyataannya penerima manfaat tersebut sebagian besar enggan beternak kambing karena belum terbiasa. Hal ini tidak sesuai dengan konsep program pemberdayaan oleh Syamsiar (2010), bahwa sasaran program yang mengarah pada penduduk miskin dan perempuan yang kebanyakan menganggur menyebabkan mereka sadar, yakin dan percaya diri untuk dapat berusaha. Dengan begitu, maka mereka akan berusaha menampilkan apa yang dapat diperbuat dan diusahakan dan nantinya dapat dikerjakan bersama.

Menurut Bapak Sadi selaku Kepala Bidang Ketersediaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (yang sebelumnya bernama Badan Ketahanan Pangan), bahwa pemberian modal berupa kambing karena selama ini peternakan kambing mudah dikembangkan dan lebih praktis dalam pendistribusiannya ke desa-desa pelaksana Program Aksi Demapan sewilayah Jawa Tengah.

Sebenarnya sebagian masyarakat Desa Kebon Gunung memiliki keterampilan beternak kambing, namun penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas kurang memiliki keterampilan beternak kambing, mereka lebih fokus mencari penghasilan dari buruh tukang bangunan maupun *srabutan* (pekerjaan apa saja) yang penting mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk itu, seharusnya bentuk kegiatan dalam Program Aksi Demapan ini disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, khususnya anggota kelompok afinitas.

Program Aksi Demapan merupakan program pemberdayaan masyarakat yang mana di dalamnya terdapat proses pemberdayaan masyarakat meliputi pelatihan, pendampingan, peningkatan akses. Selama Program Aksi Desa Mandiri Pangan berlangsung mulai tahap persiapan sampai sekarang tahap kemandirian, belum pernah dilaksanakan pelatihan oleh Instansi apa pun untuk anggota kelompok afinitas karena terbatasnya anggaran DKP dan KKP untuk mengadakan pelatihan bagi penerima manfaat Program Aksi Demapan.

Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung diberikan pada tahun 2014, namun pendamping program hanya bertugas dari tahap persiapan sampai tahap perkembangan, yaitu tahun 2014 sampai dengan 2016 karena terbatasnya anggaran DKP untuk merekrut pendamping lagi yang mendampingi desa penerima Program Aksi Demapan baru, sehingga pendamping lama dipindahtugaskan ke daerah yang masih tahap persiapan. Untuk itu, Program Aksi Demapan yang sudah tahap kemandirian diserahkan kepada penyuluh pertanian desa setempat, sehingga pada tahap kemandirian, yaitu tahun 2017, pendampingan khusus program tidak ada. Meskipun pendampingan dilaksanakan oleh penyuluh pertanian, namun hal ini kurang efektif dan optimal karena penyuluh pertanian tidak hanya bertugas pada satu desa dan satu program saja, melainkan mengemban berbagai macam tugas, pokok dan fungsinya sebagai penyuluh pertanian.

Program pemberdayaan lain yang ada di Desa Kebon Gunung, adalah PNPM dan PUAP, bahkan program-program tersebut lebih dahulu ada. Sedangkan program Desa Siaga, Lumbung Pangan dan P2KP belum ada di Desa Kebon Gunung. Selama ini program aksi Desa Mandiri Pangan belum bersinergi dengan program-program tersebut. Belum adanya sinergitas antar program pemberdayaan tersebut dikarenakan fungsi pendampingan belum maksimal,

pendamping hanya fokus pada pengembangan ternak saja. Pendamping kurang berkoordinasi dengan pendamping program yang lain, seperti PUAP dan PNPM. Masing-masing program tersebut memiliki konsep dan penerima manfaat yang berbeda, sehingga selama ini mereka masih berjalan sendiri-sendiri. Selain itu juga Program Aksi Demapan belum didukung oleh dinas-dinas yang lain. Akibatnya, Program Aksi Demapan berjalan sendiri bahkan terkesan putus, tidak ada kegiatan yang mengarah kepada sistem ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa masyarakat Desa Kebon Gunung inginnya mendapat bantuan secara langsung, kemudian habis dipakai. Kondisi ini dikarenakan masyarakat sudah terbiasa dimudahkan dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah maupun pemerintah desa. Tuntutan hidup konsumtif dan biaya sekolah menjadikan masyarakat memiliki rasa ketergantungan yang tinggi pada bantuan langsung dari pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat sulit berpartisipasi jika ada program, apapun system perencanaan program tersebut. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya masyarakat Desa Kebon Gunung diberi program dengan pendekatan perencanaan *top down* karena sesuai untuk masyarakat Desa Kebon Gunung, namun pelaksanaannya harus didampingi oleh pendamping yang aktif dan kreatif.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa :

2. Penyebab belum berhasilnya Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo :
  - a. Anggaran Program Aksi Demapan sangat terbatas, sehingga penyelenggara tidak dapat melaksanakan pendampingan secara berkelanjutan dan belum pernah mengadakan pelatihan untuk penerima manfaat.
  - b. Tidak ada koordinasi antara fasilitator dengan perangkat desa dalam menentukan Rumah Tangga Miskin (RTM), sehingga penerima manfaat dipilih tidak berdasar kriteria RTM, namun dipilih langsung oleh Kepala Desa.
  - c. Penerima manfaat kurang berpartisipasi, sehingga belum terbentuk usaha-usaha produktif.
3. Pendekatan Perencanaan Program yang tepat untuk masyarakat Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo adalah *topdown* dengan pendampingan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Kebon Gunung (penerima manfaat) adalah masyarakat transisi yang memiliki karakteristik sebagai berikut :
  - a. Penerima manfaat belum memahami pendekatan perencanaan program.

- b. Penerima manfaat lebih memilih pemberian bantuan dari pemerintah.
- c. Penerima manfaat menyukai bantuan uang yang habis pakai.

### Saran

1. Program Aksi Desa Mandiri Pangan di Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo :
  - a. Anggaran Program Demapan perlu ditingkatkan.
  - b. Pendampingan dilaksanakan secara berkelanjutan.
  - c. Fasilitator mengubah pola pikir penerima manfaat melalui pelatihan/pelatihannya sesuai dengan potensi SDM dan SDA-nya.
  - d. Penerima manfaat membentuk usaha-usaha produktif.
2. Pendekatan Perencanaan Program yang tepat untuk masyarakat Desa Kebon Gunung, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo adalah *topdown* dengan pendampingan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 2012. *Pedoman Umum Desa Mandiri Pangan Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Mardikanto, Totok. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Oleh Perusahaan*. Surakarta: UNS Press.
- \_\_\_\_\_ dan Poerwoko Soebiato. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ovalhanif. 2009. *Strategic Planning*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Ind.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syamsiar, Siti. 2010. *Membangun Ketahanan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal*. Yogyakarta: Deepublish